

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dunia Birokrasi atau Pemerintahan kita mengenal yang namanya Pemerintah daerah, Dinas, Badan, Kantor yang semua itu sering di sebut juga sebagai SKPD, setiap SKPD memiliki program kegiatan, sasaran dan sebagainya. Dalam menjalankan program dan kegiatannya sebuah SKPD memerlukan uang atau dana, mereka memperoleh dana dari BUD atas persetujuan atau rekomendasi dari PPK-SKPD , dana itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dan penerimaan dana dari BUD itu memerlukan sebuah mekanisme yang telah di atur atau di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah, PERMENDAGRI, UU dan lain-lain.

Dalam penerimaan dana dari BUD, SKPD menggunakan mekanisme penerimaan UP/GU/TU, yang di dalamnya ada beberapa dokumen yang harus di lampirkan untuk melakukan mekanisme UP/GU/TU yaitu: SPP (surat permintaan pembayaran), SPM (surat perintah membayar), SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan dokumen tersebut maka SKPD bisa mendapatkan pencairan dana dari BUD atas rekomendasi dari PPKD selaku kepala SKPKD. Mekanisme pencairan UP/GU/TU itu pertama-tama ialah: Bendahara pengeluaran di suatu SKPD menyiapkan dokumen SPP UP/GU/TU dan menyetorkannya ke PPK-SKPD untuk di verifikasi setelah di verifikasi PPK-SKPD membuat rancangan SPM dan di sampaikan ke Pengguna Anggaran untuk di otorisasi, setelah

dokumen SPM di otorisasi oleh Pengguna Anggaran lalu di serahkan ke BUD untuk selanjutnya BUD membuat dokumen SP2D dan di berikan ke BANK untuk kemudian mencairkan dana untuk SKPD yang membutuhkan dana. Pada mekanisme pencairan dana di pemerintahan cukup banyak proses yang harus di lalui dan membutuhkan beberapa dokumen untuk meleakukan pencairan dana yang di minta, dan dana yang di minta harus sesuai dengan DPA yang telah di buat oleh SKPD dan telah di sah kan oleh PPKD

Dalam penerimaan UP/GU/TU dan membelanjakan uang dari UP/GU/TU tersebut SKPD perlu melakukan pencatatan atas uang daerah yang di gunakan oleh SKPD, pencatatan itu perlu dalam dunia akuntansi apalagi akuntansi pemerintahan karena pencatatan adalah komponen dasar dalam pembuatan laporan keuangan SKPD yang akan di laporkan atau di sampaikan ke PPKD atas uang/ dana yang telah di gunakan untuk melakukan program kegiatannya yang dana tersebut bersumber dari APBD.

Proses pencatatan tersebut selalu berubah karena di pengaruhi peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah tahun ke tahun, dan proses pencatatan UP/GU/TU pun juga mengalami perubahan dan biasanya segelintir pejabat SKPD itu belum mengetahui bagaimana proses pencatatan yang baru atau belum meng update system pencatatan yang lama dengan yang baru yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dari permasalahan tersebut penulis mengambil tema tentang Penatausahaan UP/GU/TU untuk dijadikan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Program Studi Diploma III Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penulisan karya ilmiah ini yaitu: Bagaimana Kesesuaian mekanisme penatausahaan UP/GU/TU di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan terhadap SE.900/316/BAKD?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari di lakukannya Observasi ini ialah penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penatausahaan UP/GU/TU di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

Observasi ini di harapkan dapat memberikan bermanfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan

Dapat di jadikan referensi tambahan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Observasi ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat di jadikan referensi bagi observasi berikutnya.

3. Bagi Penulis

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme penatausahaan UP/GU/TU di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan

- b. Menambah wawasan tentang dunia kerja.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Observasi ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 8 Kabupaten Bangkalan ,Observasi ini di laksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 12 Januari sampai 20 Februari 2015.